



DOI: <https://doi.org/10.38035/jkmt.v4i2>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Strategi Peningkatan Partisipasi Usaha Mikro Kecil Pada Katalog Elektronik Pemerintah Provinsi Dki Jakarta

Ilvia Restu Utami¹, Ma'mun Sarma², A. Faroby Faletihan³.

¹Program Studi Manajemen Pembangunan Daerah IPB, Bogor, Indonesia, ilviarestu@apps.ipb.ac.id

²Program Studi Manajemen Pembangunan Daerah IPB, Bogor, Indonesia, msarma@apps.ipb.ac.id

³Program Studi Manajemen Pembangunan Daerah IPB, Bogor, Indonesia, alfaroby@apps.ipb.ac.id

Corresponding Author: ilviarestu@apps.ipb.ac.id¹

Abstract: *This research is motivated by the declining number of micro and small enterprises (MSEs) joining the Jakarta Provincial Government's e-catalog. The objectives of this study are to analyze the implementation of the e-purchasing policy through the electronic catalog, examine the perceptions of procurement actors and MSEs towards the implementation of the e-catalog, and formulate strategies to increase participation in the e-catalog. This study uses a qualitative descriptive approach, with data collected through questionnaires and interviews with procurement actors and MSEs. Analysis techniques include the policy implementation model, SWOT, and AHP. The results show that the implementation of the e-purchasing policy through the e-catalog in the Jakarta Provincial Government has been running well, with respondents showing positive perceptions. Required improvements include increasing the responsiveness of implementing staff in handling consultations on electronic procurement implementation issues, system improvements, and scheduled technical guidance. The formulated priority strategies include increasing competent human resources, collaboration between e-catalog managers and the PPKUKM Office in training, and coordination between ministries, institutions, and local governments.*

Keyword: *AHP, e-catalog, e-purchasing, development strategies, SWOT*

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh menurunnya jumlah usaha mikro dan kecil (UMK) yang bergabung pada katalog elektronik Pemprov DKI Jakarta. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan *e-purchasing* melalui katalog elektronik, meneliti persepsi pelaku pengadaan dan UMK terhadap implementasi katalog elektronik, dan merumuskan strategi untuk meningkatkan partisipasi dalam katalog elektronik. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan data yang dikumpulkan melalui kuesioner dan wawancara dengan pelaku pengadaan dan UMK. Teknik analisis meliputi model implementasi kebijakan, SWOT, dan AHP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan *e-purchasing* melalui e-katalog di Pemprov DKI Jakarta telah berjalan dengan baik, responden menunjukkan persepsi positif. Perbaikan yang diperlukan adalah peningkatan respon staf pelaksana dalam menangani konsultasi masalah implementasi pengadaan elektronik, perbaikan sistem, dan bimbingan teknis terjadwal. Strategi prioritas

yang dirumuskan meliputi peningkatan sumber daya manusia yang kompeten, kolaborasi antara pengelola e-katalog dan Kantor PPKUKM dalam pelatihan, serta koordinasi antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Kata Kunci: AHP, katalog elektronik, *e-purchasing*, strategi pengembangan, SWOT.

PENDAHULUAN

Usaha kecil dan menengah berperan penting dalam perekonomian Indonesia. Pada tahun 2021, terdapat 4,16 juta perusahaan industri manufaktur mikro dan kecil yang menyerap 9,11 juta tenaga kerja. Tiga industri manufaktur mikro dan kecil dengan pendapatan tertinggi adalah produk makanan, pakaian jadi, dan kayu, produk dari kayu dan gabus (kecuali mebel), industri barang dari jerami dan bahan anyaman, bambu, rotan dan sejenisnya (BPS, 2023). Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) juga ikut terdampak adanya pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara e-katalog. Penyedia barang/jasa pemerintah yang sebagian besar merupakan UMKM berkurang omzetnya atau bahkan tutup usahanya karena tidak mampu bersaing dengan perusahaan besar dalam pelaksanaan e-katalog ini. Perlu dipikirkan pola kemitraan yang digunakan dalam pelaksanaan e-katalog dengan melibatkan penyedia barang jasa golongan kecil atau UMKM di daerah. Mengingat UMKM mempunyai peran yang sangat besar dalam perekonomian di Indonesia (Iqbal, 2020).

Sebagai bentuk afirmasi pemerintah terhadap UMKM khususnya usaha mikro kecil (UMK), pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pemerintah terus berupaya untuk melakukan penyempurnaan dan perbaikan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah (PBJP) di Indonesia. Pemerintah bertujuan mewujudkan PBJP yang kredibel sehingga mampu meningkatkan ekonomi nasional serta menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam Inpres Nomor 2 Tahun 2022, Pemerintah telah mendorong penggunaan PDN yang berasal dari Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi yaitu dengan mengalokasikan 40% anggaran belanja PBJP. Salah satu kebijakan yang dilakukan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk mendukung hal tersebut adalah penggunaan metode *e-purchasing* melalui katalog elektronik pemerintah (LKPP, 2023). Perubahan tata cara pengadaan dari manual menjadi elektronik sedikit banyak memberikan dampak yang cukup signifikan dalam perbaikan proses PBJP. Terjadi peningkatan efisiensi penghematan uang negara dan meningkatnya transparansi dalam proses PBJP dibanding sebelumnya (Arifin, 2017).

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota (Pemprov DKI) Jakarta merupakan Provinsi dengan belanja katalog tertinggi di Pulau Jawa (LKPP, 2024). Menurut Buku Profil Industri Mikro Kecil Badan Pusat Statistik Pemprov DKI Jakarta, pada tahun 2023 terdapat 79.992 unit/usaha industri mikro kecil di Pemprov DKI Jakarta. Jumlah usaha mikro kecil di Pemprov DKI Jakarta yang menjadi penyedia pada katalog elektronik Pemprov DKI Jakarta dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 terus mengalami peningkatan dan berjumlah paling banyak 8.036 pelaku usaha yaitu pada tahun 2023. Namun pada tahun 2024 jumlah tersebut menurun drastis menjadi 2.656 UMK sebagaimana dijelaskan pada gambar 1.



Gambar 1.: Jumlah UMK pada Katalog Elektronik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Dimodifikasi dari LKPP (2024))

Sehubungan kondisi tersebut, perlu menganalisis hal-hal yang mempengaruhi implementasi kebijakan *e-purchasing* untuk merumuskan strategi peningkatan partisipasi UMK, sehingga tujuan penelitian ini yaitu 1) menganalisis implementasi kebijakan *e-purchasing*, 2) menganalisis persepsi pelaku pengadaan dan pelaku usaha mikro kecil pada kebijakan *e-purchasing*, dan 3) merumuskan strategi untuk peningkatan partisipasi usaha mikro kecil pada katalog elektronik Pemprov DKI Jakarta.

METODE

Penelitian dilakukan di Pemprov DKI Jakarta dengan objek pada penelitian ini adalah UMK pada Provinsi DKI Jakarta serta Pelaku Pengadaan yaitu Pelaku Pengadaan terdiri dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pengadaan (PP) sebagai pelaksana pengadaan barang/jasa pemerintah melalui *e-purchasing* katalog elektronik. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan metode purposive sampling, yang bertujuan untuk memperoleh gambaran mendalam mengenai implementasi kebijakan *e-purchasing* katalog elektronik di Pemprov DKI Jakarta. Adapun rentang waktu penelitian dilakukan selama 6 (enam) bulan yaitu bulan Juni-November 2025.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari olah data hasil wawancara dan penyebaran kuisioner kepada PPK/PP dan pelaku usaha di lingkungan Pemprov DKI Jakarta serta kepada narasumber ahli di Pemprov DKI Jakarta, LKPP, Akademisi dan Asosiasi. Data sekunder diperoleh dari dokumen dan laporan-laporan organisasi yang telah disediakan oleh instansi terkait seperti LKPP, Kementerian PPN/Bappenas, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. Data sekunder juga dihasilkan dari studi pustaka berupa studi peraturan perundang-undangan, review kajian, buku dan informasi yang relevan dengan tema penelitian.

Tahapan penelitian diawali dengan pengumpulan data lapangan untuk mengidentifikasi kondisi pelaksanaan *e-purchasing* katalog elektronik di Pemprov DKI Jakarta yang terdiri dari:

- Menganalisis implementasi kebijakan *e-purchasing* katalog elektronik di Pemprov DKI Jakarta melalui analisis deskriptif. Analisis deskriptif dapat diartikan sebagai metode analisis data dengan cara mendeskripsi atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa membuat kesimpulan atau generalisasi (Sugiyono, 2014). Sementara itu menurut I Made Winartha (2006), metode deskriptif kualitatif adalah metode analisis, menggambarkan dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang telah dikumpulkan. Penggunaan metode deskriptif kualitatif bertujuan untuk mengumpulkan data, interpretasi data, observasi langsung di lapangan, analisis data dan informasi untuk kemudian disusun menjadi sebuah kesimpulan awal lalu dikaji lebih lanjut dengan menyandingkan hasil hitung serta olah data yang tersedia. Secara spesifik, metode analisis deskriptif kualitatif diaplikasikan untuk menggali informasi terkait kondisi terkini implementasi katalog elektronik pada UMK di Pemprov DKI Jakarta

terutama terkait permasalahan dalam partisipasi UMK dalam katalog elektronik. Hasil analisis akan disajikan dalam bentuk narasi, tabel, diagram dan gambar.

- b. Menganalisis gambaran persepsi pelaku usaha mikro kecil dan pelaku pengadaan pada kebijakan *e-purchasing* di Pemprov DKI Jakarta menggunakan pendekatan analisis implementasi kebijakan model Van Meter dan Van Horn (1975) (dalam Subarsono, 2005:99) dengan mengidentifikasi 6 (enam) indikator yang mempengaruhi implementasi yaitu standar dan sasaran kebijakan; sumberdaya; komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas; karakteristik agen pelaksana; lingkungan ekonomi, sosial, dan politik; dan sikap para pelaksana. Indikator diukur dengan skala likert yang setiap jawaban responden dikonversi menjadi skor untuk memperoleh total skor dan indeks persentase. Rumus nilai indeks persentase persepsi sebagai berikut :

$$\text{Nilai Indeks (\%)} = \frac{\text{Total Skor}}{\text{Skor Tertinggi}} \times 100\%$$

Keterangan :

- Skor Tertinggi : merupakan nilai maksimum yang dapat diperoleh pada setiap pernyataan apabila seluruh responden memilih kategori Sangat Setuju (SS) dengan skor 5. **Skor tertinggi = jumlah responden x skor maksimum (5)**
- Total Skor : menggambarkan jumlah keseluruhan nilai jawaban responden terhadap setiap pernyataan.
- **Total Skor = (STS×1)+(TS×2)+(KS×3)+(S×4)+(SS×5).**

Keterangan :

STS = Sangat Tidak Setuju; TS = Tidak Setuju; KS = Kurang Setuju; S=Setuju; dan SS = Sangat Setuju

- Nilai indeks ini kemudian diinterpretasikan dengan kategori:
 - 1) 0%–19,9% = Sangat Tidak Setuju
 - 2) 20%–39,9% = Tidak Setuju
 - 3) 40%–59,9% = Kurang Setuju
 - 4) 60%–79,9% = Setuju
 - 5) 80%–100% = Sangat Setuju (Amisi dan Saian:2022)

- c. Selanjutnya berdasarkan berdasarkan gambaran implementasi kebijakan *e-purchasing* dan persepsi pelaku usaha dan pelaku pengadaan maka disusunlah faktor internal dan eksternal yang terdiri dari kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Setelah mendapatkan faktor kekuatan kelemahan, peluang dan ancaman, disusunlah matriks SWOT. Berdasarkan alternatif strategi dilakukan analisis menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process (AHP)* untuk mendapatkan prioritas strategi. Penilaian terhadap alternatif strategi dilakukan oleh narasumber ahli yang berasal dari Pemprov DKI Jakarta, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), akademisi dan asosiasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis implementasi kebijakan *e-purchasing* katalog elektronik di Pemprov DKI Jakarta

Pelaksanaan *e-purchasing* katalog elektronik di Pemprov DKI Jakarta dilaksanakan melalui aplikasi katalog elektronik dan *e-order* yang dimiliki khusus oleh Pemprov DKI Jakarta. Pada tahun 2023 diterbitkan Instruksi Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2023 tentang Transaksi E-Purchasing dengan Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil Melalui Sistem e-Order. Pada Instruksi Gubernur tersebut diinstruksikan bahwa untuk memperluas transaksi *e-purchasing* dengan usaha mikro dan/atau usaha kecil di Provinsi DKI Jakarta, seluruh OPD melakukan transaksi *e-Purchasing* dengan usaha mikro dan/atau usaha kecil di Provinsi DKI Jakarta untuk kegiatan makan dan minum paling banyak

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per transaksi melalui sistem *e-Order*. Penurunan jumlah UMK di tahun 2024 dikarenakan kebijakan khusus *e-purchasing* hanya diterbitkan pada tahun 2023 sehingga jumlah UMK yang bergabung menurun pada tahun 2024. Sampai dengan September 2025 telah dilaksanakan transaksi sebanyak Rp254.709.746.862 (Dua ratus lima puluh empat milyar tujuh ratus sembilan juta tujuh ratus empat puluh enam ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah). E-Order digunakan oleh 777 OPD dan 13 BUMD di Provinsi DKI Jakarta (BPPBJ DKI Jakarta, 2025).

Analisis persepsi pelaku pengadaan dan pelaku usaha mikro kecil pada kebijakan *e-purchasing* katalog elektronik di Pemprov DKI Jakarta

Analisis persepsi pelaku pengadaan dan pelaku usaha pada kebijakan *e-purchasing* katalog elektronik pada Pemprov DKI Jakarta dilakukan dengan kuisioner menggunakan skala *likert* yang disampaikan kepada responden yang terdiri dari 10 OPD dengan nilai *e-purchasing* terbesar di Pemprov DKI Jakarta dan kepada penyedia UMK Pemprov DKI Jakarta yang terdiri 42 responden (6 responden Jakarta Pusat, 7 responden Jakarta Utara, 8 responden Jakarta Barat, 10 responden Jakarta Selatan, 10 responden Jakarta Timur dan 1 Responden Kepulauan Seribu). Informasi yang didapatkan dari responden disampaikan pada Tabel 1 sebagai berikut.

Tabel 1 Analisis persepsi pelaku pengadaan dan pelaku usaha mikro kecil dalam implementasi kebijakan *e-purchasing* katalog elektronik di Pemprov DKI Jakarta

No	Indikator	Persepsi Pelaku Usaha	Persepsi Pelaku Pengadaan	Keterangan
1	Standar Sasaran Kebijakan	80,19 % (Sangat Setuju): Pelaku usaha mengetahui tujuan kebijakan, peraturan lengkap dan mudah dipahami, SOP sudah jelas, katalog elektronik mempermudah dan mempercepat pelaksanaan PBJP	84,75 % (Sangat Setuju): Pelaku Pengadaan memahami tujuan dengan baik, peraturan lengkap dan mudah dipahami, SOP sudah jelas, katalog elektronik mempermudah dan mempercepat pelaksanaan PBJP	Tujuan kebijakan dipahami seluruh pihak, peraturan sudah lengkap, terdapat SOP, katalog elektronik mempermudah serta mempercepat pelaksanaan PBJP
2	Sumberdaya	77,15 % (Setuju): Pelaku usaha setuju pegawai yang terlibat mencukupi secara jumlah dan kompetensi, system katalog handal, dan anggaran pelaksanaan cukup. Namun pegawai masih kurang cepat dalam merespon permasalahan	75,00 % (Setuju): Pelaku Pengadaan merasa pegawai yang terlibat mencukupi secara kompetensi namun belum mencukupi secara jumlah, system katalog dirasa handal, dan anggaran pelaksanaan cukup.	Pegawai yang terlibat mencukupi secara kompetensi, namun belum mencukupi secara jumlah, respon pegawai dalam menyelesaikan permasalahan masih kurang cepat.
3	Komunikasi Antar Organisasi dan Penguatan Aktivitas Pelaku Usaha	80 % (Sangat Setuju): koordinasi antara LKPP dan Pemerintah Daerah serta koordinasi antara Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha mudah dilaksanakan	78,75 % (Setuju): koordinasi antara LKPP dan Pemerintah Daerah serta koordinasi antara Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha mudah dilaksanakan, namun masih diperlukan peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah dengan LKPP	Pelaksanaan koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan LKPP dan Pelaku Usaha sudah cukup baik, namun perlu ditingkatkan khususnya koordinasi LKPP dengan Pemerintah Daerah terkait dengan sistem baru yang dikembangkan.
4	Karakteristik Pegawai Pelaksana	79,52 % (Setuju): Pelaku usaha setuju bahwa pegawai memiliki kewenangan, komitmen tinggi dan integritas baik dalam katalog elektronik. Namun masih kurang cepat dalam merespon permasalahan.	81,56 % (Sangat Setuju): Pelaku Pengadaan setuju bahwa bahwa kewenangan pegawai masih kurang, komitmen pegawai tinggi dan integritas baik dalam katalog elektronik. Namun masih perlu peningkatan dalam merespon permasalahan.	Pegawai pelaksana sudah memiliki komitmen dan integritas yang baik, namun masih perlu peningkatan kewenangan dan percepatan dalam merespon permasalahan
5	Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik	82,54 % (Sangat Setuju): Pelaku usaha setuju pihak kondisi ekonomi sangat mempengaruhi pelaksanaan katalog elektronik	84,58 % (Sangat Setuju) pihak eksternal mendukung pelaksanaan katalog elektronik	Pihak eksternal mendukung pelaksanaan katalog elektronik, dinamika politik dan kondisi ekonomi mempengaruhi pelaksanaan katalog elektronik

No	Indikator	Persepsi Pelaku Usaha	Persepsi Pelaku Pengadaan	Keterangan
6	Sikap Pelaksana	80 % (Sangat Setuju) Pelaku usaha setuju bahwa pelaksana antusias terhadap pelaksanaan kebijakan katalog elektronik	85 % (Sangat Setuju): Pelaku Pengadaan setuju bahwa pelaksana antusias terhadap pelaksanaan kebijakan katalog elektronik	Pelaksana sangat antusias terhadap pelaksanaan kebijakan katalog elektronik

Berdasarkan survei persepsi pelaku pengadaan dan pelaku usaha mikro kecil menyatakan bahwa kebijakan *e-purchasing* katalog elektronik di Pemprov DKI Jakarta telah berjalan baik dengan indeks persepsi 80,75% yaitu berada pada kategori “sangat setuju” dari kedua kelompok responden (pelaku usaha dan pelaku pengadaan).

Keenam indikator implementasi kebijakan menunjukkan rata-rata hasil setuju hingga sangat setuju, yang berarti kebijakan telah dipahami dan dijalankan secara cukup efektif. Namun, masih terdapat beberapa catatan yang disampaikan responden, yaitu perlu peningkatan respon pegawai pelaksana dalam mengatasi konsultasi permasalahan pelaksanaan *e-purchasing*, perbaikan sistem dan sosialisasi/bimbingan teknis secara terjadwal kepada UMK khususnya untuk kebijakan dan fitur baru dalam sistem yang digunakan pada *e-purchasing*.

Berdasarkan hasil gambaran implementasi kebijakan *e-purchasing* katalog elektronik di Pemprov DKI Jakarta, diperoleh faktor internal sebagai berikut.

Tabel 2 Faktor internal peningkatan partisipasi UMK pada katalog elektronik Pemprov DKI Jakarta

Lingkungan Internal	Kekuatan	Kelemahan
Peraturan Pemprov DKI Jakarta	- Petunjuk teknis dan SOP cukup jelas dan mudah diterapkan - Adanya sistem <i>e-order</i> milik Pemprov DKI Jakarta	Tidak adanya lagi peraturan Pemprov DKI Jakarta terkait kewajiban pembelian dalam <i>e-order</i> pada tahun 2024 sampai dengan 2025
Sumberdaya Manusia	Dukungan dinas di lingkungan Pemprov DKI Jakarta terhadap pelaksanaan <i>e-purchasing</i> dalam katalog elektronik cukup baik.	- Pegawai pelaksana lambat melakukan respon terhadap keluhan atau masalah - Masih kurangnya jumlah pegawai yang bertugas merespon permasalahan
Sistem/aplikasi	- Aplikasi mempermudah dan mempercepat proses pengadaan barang/jasa pemerintah - Aplikasi transparan, efisien, dan mudah diakses oleh pelaku UMK	- Pemerintah lambat melakukan proses pembayaran - Masih sering terjadi <i>error/bug</i> pada sistem, seperti OTP tidak masuk, <i>website</i> lambat, atau sistem hang

Berdasarkan hasil survei yang dilaksanakan pada pelaku pengadaan dan pelaku usaha mikro kecil diperoleh faktor lingkungan internal implementasi kebijakan *e-purchasing* pada katalog elektronik pemprov DKI Jakarta adalah peraturan Pemprov DKI Jakarta yang menjadi kekuatan karena petunjuk teknis dan *Standart Operational Procedure* yang jelas. Namun tidak adanya lagi kebijakan khusus *e-purchasing* menjadi kelemahan. Faktor selanjutnya adalah sumberdaya manusia dan sistem yang menjadi kelemahan karena masih lambatnya respon pelaksana dan masih lambatnya proses pembayaran.

Analisis Faktor Eksternal

Berdasarkan hasil gambaran implementasi kebijakan *e-purchasing* katalog elektronik di Pemprov DKI Jakarta, diperoleh faktor eksternal sebagai berikut.

Tabel 3 Faktor eksternal peningkatan partisipasi UMK pada katalog elektronik Pemprov DKI Jakarta

Lingkungan Eksternal	Peluang	Ancaman
Peraturan/Kebijakan Pemerintah Pusat	• Terbitnya regulasi baru yang mewajibkan pembelian pada katalog elektronik • Perluasan pengguna yang dapat melakukan pembelian dalam katalog elektronik • Perluasan jenis barang/jasa pada katalog elektronik	• Perubahan regulasi/kebijakan yang terlalu sering dan tidak konsisten.
Lingkungan Sosial Budaya dan Politik	Dukungan pemerintah pusat pada penggunaan katalog elektronik	• Persaingan harga tidak sehat • Masih adanya praktik KKN • Harga barang/jasa di luar katalog lebih murah • Ketidakpastian ekonomi dan dinamika politik
Sistem/aplikasi	Penggunaan teknologi secara <i>real time</i> dan <i>Artificial Intelligence</i>	

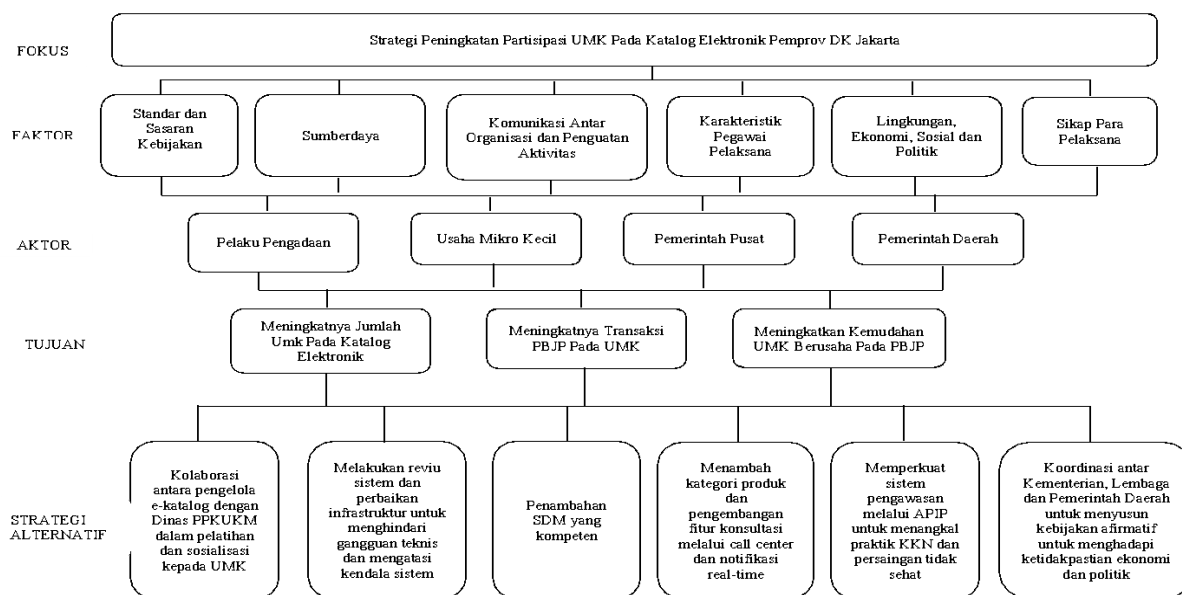
Berdasarkan hasil survei yang dilaksanakan pada pelaku pengadaan dan pelaku usaha mikro kecil diperoleh faktor lingkungan eksternal implementasi *kebijakan e-purchasing* pada katalog elektronik pemprov DKI Jakarta adalah sistem aplikasi yang berpeluang dikembangkan dengan adanya teknologi *real time* dan *artificial intelligence*. Faktor selanjutnya adalah adanya kebijakan pemerintah pusat yang menjadi peluang dan lingkungan sosial, budaya dan politik yang menjadi ancaman karena adanya ketidakpastian dan dinamika politik.

Tahapan ini adalah mencocokkan hasil analisis dengan menggunakan matriks SWOT. Matriks SWOT disusun berdasarkan pembahasan faktor internal dan eksternal dengan membandingkan unsur-unsur sub faktor sehingga memunculkan strategi SO, strategi WO, strategi ST dan strategi WT. Rumusan alternatif strategi peningkatan partisipasi usaha mikro kecil pada katalog elektronik Pemprov DKI Jakarta disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4 Strategi peningkatan partisipasi usaha mikro kecil pada katalog elektronik Pemprov DKI Jakarta

Strategi S-O		Strategi W-O	
1. Kolaborasi antara pengelola e-katalog dengan Dinas PPKUKM dalam pelatihan dan sosialisasi kepada UMK (S1, S3, S4, O1, O3, O4)		2. Melakukan rewiu sistem dan perbaikan infrastruktur untuk menghindari gangguan teknis dan mengatasi kendala sistem (W3, W5)	
		3. Penambahan SDM yang kompeten (W4, O1, O2, O3)	
		4. Menambah kategori produk dan pengembangan fitur konsultasi melalui <i>call center</i> dan notifikasi <i>real-time</i> (W2, W3, O2, O3, O5)	
Strategi S-T		Strategi W-T	
5. Memperkuat sistem pengawasan melalui APIP untuk menangkal praktik KKN dan persaingan tidak sehat. (S2, S5, T2, T3, T4)		6. Koordinasi antar Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk menyusun kebijakan afirmatif UMK. (W1, W4, T1, T5,)	

Berdasarkan strategi tersebut disusun matriks analisis hierarki proses (AHP). Analisis AHP digunakan sebagai alat bantu yang bersifat kuantitatif dan objektif untuk menunjukkan strategi mana yang paling relevan dan layak diimplementasikan. Metode ini menggunakan hasil dari matriks SWOT, sehingga menghasilkan keputusan strategis yang terukur. Matriks AHP dapat dilihat pada gambar 2.



Gambar 2. Hierarki Peningkatan Partisipasi UMK Pada Katalog Elektronik Pemprov DKI Jakarta

Berdasarkan hasil analisis AHP dihasilkan urutan prioritas strategi peningkatan partisipasi usaha mikro kecil pada katalog elektronik Pemprov DKI Jakarta yang disajikan pada Tabel 5. Tabel 5 Prioritas strategi peningkatan partisipasi usaha mikro kecil pada katalog elektronik Pemprov DKI Jakarta

No Strategi	Alternatif Strategi	Bobot	Prioritas Strategi
3	Penambahan SDM yang kompeten	0,219	1
1	Kolaborasi antara pengelola e-katalog dengan Dinas PPKUKM dalam pelatihan dan sosialisasi kepada UMK	0,199	2
6	Koordinasi antar Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk menyusun kebijakan afirmatif untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi dan politik	0,193	3
4	Menambah kategori produk dan pengembangan fitur konsultasi melalui call center dan notifikasi real-time	0,179	4
2	Melakukan reviu sistem dan perbaikan infrastruktur untuk menghindari gangguan teknis dan mengatasi kendala system	0,129	5
5	Memperkuat sistem pengawasan melalui APIP untuk menangkal praktik KKN dan persaingan tidak sehat	0,81	6

Hasil analisis AHP menunjukkan bahwa strategi dengan bobot tertinggi adalah **penambahan SDM yang kompeten, kolaborasi antara pengelola e-katalog dengan Dinas PPKUKM dalam pelatihan dan sosialisasi kepada UMK**, dan **koordinasi antar Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk menyusun kebijakan afirmatif untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi dan politik**. Ketiga strategi ini menjadi prioritas utama karena dinilai paling berpengaruh dalam mendorong peningkatan partisipasi UMK pada katalog elektronik Pemprov DKI Jakarta. Strategi lainnya, seperti Menambah kategori produk dan pengembangan fitur konsultasi melalui call center dan notifikasi real-time, melakukan reviu sistem dan perbaikan infrastruktur untuk menghindari gangguan teknis dan mengatasi kendala system, memperkuat sistem pengawasan melalui APIP untuk menangkal praktik KKN dan persaingan tidak sehat tetap penting namun berada pada urutan prioritas berikutnya. Selanjutnya 3 prioritas strategi peningkatan partisipasi usaha mikro kecil pada katalog elektronik Pemprov DKI Jakarta utama disusun roadmap strategi sebagaimana dijelaskan pada Tabel 6.

Tabel. 6 Program peningkatan partisipasi UMK pada katalog elektronik Pemprov DKI Jakarta

No	Strategi	Program Kegiatan	Pelaksanaan kegiatan	Pihak yang terlibat
1	Penambahan SDM yang kompeten	Penambahan pegawai penerima konsultasi, kurasi dan verifikasi produk	2027	BPPBJP DKI Jakarta
		Pemetaan kebutuhan dan pelaksanaan bimtek penggunaan katalog elektronik bagi pelaku pengadaan, bendahara pengeluaran dan pelaku usaha mikro kecil	2027	BPPBJ Pemprov DKI Jakarta, Dinas PPKUKM Pemprov DKI Jakarta
		Pelatihan kompetensi SDM yang terlibat dalam katalog elektronik	2027- 2029	BPPBJ Pemprov DK Jakarta, Seluruh OPD Pemprov DKI Jakarta, LKPP
2	Kolaborasi antara pengelola e-katalog dengan Dinas Dinas PPKUKM dalam pelatihan dan sosialisasi kepada UMK	Pendataan dan identifikasi pelaku usaha lokal potensial pada Pemprov DKI Jakarta	2027	Dinas PPKUKM Pemprov DKI Jakarta
		Sosialisasi pengadaan melalui katalog elektronik kepada UMK DKI Jakarta	2027- 2029	BPPBJ Pemprov DK Jakarta, Dinas PPKUKM Pemprov DKI Jakarta, BPTSP
		Pendampingan pemenuhan persyaratan administrasi bagi UMK yang akan masuk pada katalog elektronik	2027- 2029	BPPBJ Pemprov DK Jakarta, Dinas PPKUKM Pemprov DKI Jakarta, BPTSP
		Pendampingan UMK dalam pendaftaran, penayangan produk dan proses administrasi pada katalog elektronik	2027- 2029	BPPBJ Pemprov DK Jakarta, Dinas PPKUKM Pemprov DKI Jakarta, BPTSP, LKPP
		Kolaborasi dengan perbankan dan asosiasi usaha untuk pembiayaan dan pemasaran.	2027- 2031	BPPBJ Pemprov DK Jakarta, Dinas PPKUKM Pemprov DKI Jakarta,
3	Koordinasi antar Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk menyusun kebijakan afirmatif untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi dan politik	Pembentukan tim koordinasi antar Kementerian, Lembaga dan Pemerintah	2027- 2029	Kementerian Koordinasi, Pemerintah Daerah, LKPP
		Pengawasan tim koordinasi secara terjadwal untuk memastikan progres kebijakan afirmatif	2027- 2031	Kementerian Koordinasi, Pemerintah Daerah, LKPP

KESIMPULAN

Belanja pengadaan barang/jasa menggunakan *e-purchasing* pada DKI Jakarta menunjukkan tren meningkat, namun jumlah usaha mikro kecil yang bergabung menunjukan tren menurun. Implementasi *e-purchasing* pada Pemrov DKI Jakarta menggunakan aplikasi katalog elektronik dan *e-order* yang dimiliki khusus oleh Pemprov DKI Jakarta. Penurunan jumlah usaha mikro kecil di tahun 2024 dikarenakan kebijakan khusus *e-purchasing* hanya dilaksanakan pada tahun 2023 sehingga jumlah peningkatan usaha mikro kecil yang bergabung menurun pada tahun 2024.

Persepsi pelaku pengadaan dan pelaku usaha mikro kecil terhadap kebijakan *e-purchasing* katalog elektronik di Pemprov DKI Jakarta menyatakan bahwa kebijakan *e-purchasing* telah berjalan baik dengan tingkat persepsi 80,75%. Berdasarkan indikator standar dan sasaran kebijakan, sumberdaya manusia, komunikasi antar organisasi, pegawai

pelaksana memiliki komitmen dan integritas, dan lingkungan ekonomi, sosial, politik dapat diketahui bahwa pelaksanaan kebijakan terlaksana dengan baik. Namun, masih terdapat beberapa catatan yang disampaikan responden, yaitu perlu peningkatan respon pegawai pelaksana dalam mengatasi konsultasi permasalahan pelaksanaan *e-purchasing*, perbaikan sistem dan sosialisasi/bimbingan teknis secara terjadwal kepada UMK serta penambahan pegawai pelaksana.

Prioritas strategi untuk meningkatkan partisipasi usaha mikro kecil pada katalog elektronik pemerintah Pemprov DKI Jakarta terdiri dari Penambahan SDM yang kompeten, kolaborasi antara pengelola e-katalog dengan Dinas PPKUKM dalam pelatihan dan sosialisasi kepada UMK, dan koordinasi antar Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk menyusun kebijakan afirmatif untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi dan politik.

REFERENSI

- Amisi, Margendy Albertinus dan Saian, Pratayaksa Ocsa Nugraha. 2022. Rancang bangun sistem informasi pendataan pegawai pada dinas perhubungan Kota Salatiga berbasis web menggunakan framework laravel. Jurnal Ilmiah Indonesia. ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398. Vol. 7, No. 11.
- Apriansyah, Rudy Mulya dan Subandi. 2018. Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Sistem E-Katalog Di Badan Penelitian Dan Pengembangan Energi Dan Sumber Daya Mineral. Politeknik STIA LAN Jakarta: DKI Jakarta
- Ariesta, Deby. 2021. Effectiveness of Procurement of Goods and Services Through E-Catalogue in Kebayoran Lama District, Jakarta Selatan Administration City .Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jakarta. ASCARYA Vol. 1 No. 2 (2021): Islamic Science, Culture, and Social Studies DOI: <https://doi.org/10.53754/iscs.v1i2.26>
- Arifin Kaimal, Daga Rosnaini, dan Anshar Muh.Ashary. Analisis Penerapan E-Katalog terhadap Efektifitas dan Kepuasan Penyedia Pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Institut Bisnis dan Keuangan Nitro: Makassar
- Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta. 2025. Transaksi e-order sampai dengan September 2025. <https://eorder-bppbj.jakarta.go.id/>. Diakses 10 Oktober 2025
- Badan Pusat Statistik. 2023. Profil Industri Mikro dan Kecil 2021. Badan Pusat Statistik: Jakarta
- Badan Pusat Statistik. Buku Profil Industri Mikro Kecil Badan Pusat Statistik Pemprov DKI Jakarta 2023. Badan Pusat Statistik: Jakarta
- David, Fred R. 2006. Manajemen Strategi. Prenhallindo: Jakarta.
- Fauziyah, Wennyta Eka dan Arif, Lukman. Model Implementasi Kebijakan Van Meter Dan Van Horn dalam Tinjauan Pembangunan Jalan Lingkar Selatan (Ring Road) di Kabupaten Tuban. Journal Publicuho Volume 4 Number 2 (May-July) (2021)pp. 672-691
- Hudrasyah Herry, Nugraha Muhamad Yusuf Chandra dan Rahadi Raden Aswin. 2019. E-Catalogue Attractiveness Study To Increase Suppliers Participation. International Journal of Accounting, Finance and Business (IJAFB) Volume: 4 Issues: 20 [June, 2019] pp.14-31] Journal website: www.ijafb.com
- Idrus M. 2009. Metode Penelitian Ilmu Sosial. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Iqbal, Muhammad. 2020. Pengaruh Pelaksanaan E Katalog Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Terhadap UMKM. Jurnal Sains Manajemen Nitro <https://ojs.nitromks.ac.id/index.php/jsmn>

- Lestyowati, Jamila. 2018. Analisis Permasalahan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa Satuaan Kerja. Simposium Nasional Keuangan Negara. Balai Diklat Keuangan Yogyakarta
- LKPP. 2024. Laporan Monitoring Kinerja Pengadaan 2023. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: DKI Jakarta
- LKPP. 2023. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pengadaan Barang/Jasa Publik: DKI Jakarta
- Nafiáh, Binti Azizatul. 2022. Analisis Stakeholder Kebijakan E-Katalog Lokal dalam Membranding Produk Lokal. Public Sphere Reviu Jurnal of Public Administration Vol 1 No.2 September (2022) Page 15-21
- Saaty Thomas L. 1993. Analitik Hieraki Proses (AHP). 1993. PT Pustaka Binaman Pressindo: Jakarta.
- Sa'adah, Nurus. The Implementation of E-Procurement in Indonesia: Benefits, Risks, and Problems. UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia. Available online at Inferensi Website://inferensi.iainsalatiga.ac.id
- Setianingrum, Wuri. 2026. Strategi Optimalisasi E-Purchasing Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Kabupaten Musi Rawas Utara. Institut Pertanian Bogor: Bogor
- Sitairesmi, Niken Novia. 2025. Strategi Pemerintah Kabupaten Bogor Dalam Meningkatkan Belanja Pengadaan Kepada UMK Melalui E-Katalog. Institut Pertanian Bogor: Bogor
- Sitepu, Yuda Mulia Ramadhan. 2023. Peran UMKM dalam Penaggulangan Kemiskinan di Indonesia. BENEFIT: Journal Of Business, Economics, And Finance Volume 1 Issue 2 2023 Page 99-108
- Subarsono, A. 2011. Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori, dan Aplikasi). Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tahir, Arifin. 2011. Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. PT.Pustaka Indonesia Press: DKI Jakarta
- Winartha, I Made. 2006. Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Yogyakarta: Graha Ilmu.